

Alokasi Dana Desa sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan Desa Taman Kuncaran Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang

Ignatius Adiwidjaja^{1*}, Agung Suprojo²

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang

*Email korespondensi: ignatius.adiwidjaja17@gmail.com

Abstract. *Acceleration in the implementation of development certainly requires a budget whose funding sources are always ready to work. This will directly affect social welfare, economy, as well as education for the people of Taman Kuncaran Village, Tirtoyudo District, Malang Regency. Focus research is Role Government Village in Village Fund Allocation as effort enhancement development. Results research shows that with the realization of the Village Fund Allocation (ADD); the structure of social, economic, and educational development can touch all levels of society, social and economic welfare, for the people of Taman Kuncaran Village, Tirtoyudo District, Malang Regency, it is increasingly real for the whole community, this can be seen from the existence of enhancement income per capita community, both from agriculture sector, industry, and services have been able to change civilization structure as well as the social strata of the local community.*

Keywords: *Government Village; Village Fund Allocation' Village Development*

Abstrak. Percepatan dalam pelaksanaan pembangunan tentunya membutuhkan anggaran yang sumber pendanaannya selalu siap bekerja. Hal ini secara langsung akan mempengaruhi kesejahteraan sosial, ekonomi, serta pendidikan bagi masyarakat Desa Taman Kuncaran, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Fokus penelitian adalah Peran Pemerintah Desa dalam Alokasi Dana Desa sebagai upaya peningkatan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD); struktur pembangunan sosial, ekonomi, dan pendidikan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat, kesejahteraan sosial dan ekonomi, bagi masyarakat Desa Taman Kuncaran Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang semakin nyata bagi seluruh masyarakat, hal ini terlihat dari Adanya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, baik dari sektor pertanian, industri, maupun jasa telah mampu mengubah struktur wisata peradaban maupun strata sosial masyarakat setempat.

Kata kunci: Anggaran Dana Desa; Pemerintah Desa; Pembangunan Desa

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia. Pembangunan sarana dan prasarana di desa tentu saja sangat dibutuhkan. Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting terutama dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif agar mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan secara nyata dan bertanggungjawab. Pemerintah desa merupakan satu komponen pemerintahan yang terdiri dari kepala desa beserta semua perangkat yang ada di desa. Untuk menjalankan roda pemerintahan, pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh sekretaris desa, kepala urusan pemerintahan, dan perangkat lainnya termasuk kepala dusun. (Kharimah, Saleh dan Wanusmawatie, 2013)

Sumber pendapatan desa salah satunya adalah Alokasi Dana Desa (ADD) sangat di butuhkan oleh pemerintahan desa dalam rangka memenuhi kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam pelaksanaan pengelolaan dan pembangunan desa. Dalam pengalokasian dana desa perlu adanya pengelolaan yang baik dari perangkat desa agar pada tahap pelaksanaan dapat tercapai sesuai dengan maksud dan tujuan ADD. Dengan demikian dana tersebut dapat di kelola dengan baik (Andiawan, 2018). Penggunaan dana desa menjadi prioritas dalam pemeliharaan sarana dan prasarana untuk

kesejahteraan masyarakat. Prakarsa pemerintah desa dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan lain-lain yang berhubungan dengan upaya peningkatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat menjadi sasaran prioritas dalam penggunaan dana desa. Untuk itu, semua yang berhubungan dengan upaya-upaya tersebut diatas oleh pemerintah desa dan masyarakat selalu disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa (Musrenbangdes), mempertimbangkan kajian desa berdasarkan kemajuan desa (Madea, Alden, & Londa, 2017).

Pengelolaan keuangan desa, atau Alokasi Dana Desa (ADD), dapat diartikan bahwa pengelolaan keuangan harus transparan dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat, terutama dalam proses perencanaan, karena pelaksanaan yang sebenarnya didasarkan pada pelaksanaan administrasi yang sesuai dengan aturan, berbasis pengeluaran laporan atau catatan, tanggung jawab berdasarkan hasil laporan (Rahum, 2015). Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan alokasi dana desa (ADD) dalam APBD setiap tahun anggaran, minimal 10% dari saldo dana yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi tertentu. Tata cara pemberian ADD diatur dalam statuta kabupaten/kota. Penyaluran ADD dari kabupaten ke desa berlangsung secara bertahap, dengan norma kabupaten/kota berdasarkan peraturan menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kamaroesid, 2017: 268).

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendorong masyarakat pedesaan agar berpartisipasi dalam pembangunan secara aktif. Pembangunan sangat penting dilakukan demi kesejahteraan bersama di Desa Taman Kuncaran Tirtoyudo Kabupaten Malang. Siklus Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan desa, sebagaimana didefinisikan oleh UU Desa, terdiri dari tiga (tiga) fase kritis: perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas. Perencanaan adalah konsep “menciptakan desa” dan “mengembangkan desa” menjadi pedoman perencanaan pembangunan desa. Dari segi perencanaan, konsep pembangunan desa mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan, dalam Pasal 100 PP No. 43 Tahun 2014, disebutkan bahwa biaya desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa digunakan dengan ketentuan, minimal 70% dari total anggaran desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengembangan masyarakat desa. Pendapatan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa tidak lebih dari 30% dari keseluruhan anggaran desa. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa keuangan desa terbatas pada penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pembayaran pendapatan dan tunjangan tingkat khusus bagi perangkat desa, Badan Musyawarah Desa dan Rukun Tetangga / Rukun Warga.

Pertanggungjawaban; Kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Dalam PP No. 43 tahun 2014, pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang harus diikuti oleh kepala desa. Kepala desa wajib melaporkan pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan tengah tahunan). Selain itu, kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan).

Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APBDesa tercantum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri juga mengatur standar dan format laporan pertanggungjawaban yang harus disiapkan oleh kepala desa. Pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan inkremental adalah proses pengendalian, pengaturan,

pengelolaan, dan pelaksanaan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, hal ini semata-mata bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terus menerus untuk mencapai kemajuan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya dan bersifat dinamis. Oleh karena itu, dalam pembangunan terdapat unsur-unsur; *Perubahan*, yaitu perubahan dari apa yang dianggap kurang sempurna, *Tujuan*, adalah tujuan yang ingin dipertahankan oleh orang (rakyat), kelangsungan hidup, kemakmuran dan kebahagiaan hidup yang lebih baik, dan Potensi, khususnya potensi masyarakat yang terkandung dalam masyarakat itu sendiri yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Menurut Kansil Patton, (2005:60) bahwa pembangunan yang dicapai di desa bersifat menyeluruh dan terpadu, adanya keseimbangan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah berkewajiban memberikan nasihat, bimbingan, dukungan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasi dalam bentuk swadaya dan bekerja sama satu sama lain dalam pembangunan yang diinginkan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ilmiah memerlukan strategi-strategi yang akan digunakan agar tujuan penelitian dapat tercapai. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui informasi kepustakaan misalnya, buku, jurnal ilmiah, majalah dan dokumen (Syadid, 2009: 52).

Data yang di gunakan dalam penelitian ini ialah data Primer dan data Sekunder. Data Primer yang dimaksud adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh subyek penelitian sebagaimana segala informasi yang dicari. Dan segala yang dikumpulkan oleh lembaga setempat pada saat observasi awal. Data Sekunder adalah data yang tidak memberikan secara langsung kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen yang berupa buku, arsip-arsip, dokumen desa, serta arsip lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis data ialah Proses pencarian dan pengumpulan data secara sistematis yang di dapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi pada saat observasi awal dan memilih mana yang penting untuk dikerjakan dan membuat kesimpulan dengan mudah, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. (Sugiyono, 2014: 244).

PEMBAHASAN

Alokasi Dana Desa Sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan Desa

Pemerintah desa menjadi organ yang sangat penting bagi masyarakat; baik dalam mengatur urusan aparatur desa, tata kelola keuangan desa, maupun pembangunan desa secara umum. Dalam hal ini peran pemerintahan desa tentu secara menyeluruh disemua bidang kehidupan di desa; Sosial, Politik, Ekonomi, Pendidikan dan sebagainya. Apapun yang hubungan dengan upaya peningkatan kesejahteraan desa dan semua hal penting lain dilakukan oleh pemerintah desa. Peran penting pemerintahan desa dalam memimpin masyarakat juga memenuhi tugas dan wewenang aparatur negara yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya sebagai pegawai negeri.

Aparatur pemerintahan desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan sebagai penyelenggara pemerintahan di lingkungan desa dalam perannya yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat desa. Masyarakat membutuhkan pengelolaan alokasi dana desa. Alokasi dana desa sangat memudahkan

pembangunan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur atau kegiatan lainnya. Dalam hal ini pembangunan desa tidak lepas dari kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat. Misalnya, pemerintah desa harus terlebih dahulu menyelenggarakan musyawarah desa (musrenbangdes) agar masyarakat turut serta dalam kegiatan pembangunan yang ada di desa.

Alokasi Dana Desa

Pemerintah desa mengalokasikan dana dana harus secara transparan dan jelas agar tim pelaksana dalam Alokasi Dana Desa (ADD) dapat melakukan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, sumber daya manusia pemerintah desa juga harus yang berkualitas tinggi. Hal ini didasarkan pada pengetahuan aparat desa tentang tanggung jawab dan fungsi utama mereka. Pembangunan desa tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat misalnya Pemerintah desa terlebih dahulu harus melakukan musyawarah desa (Musrenbangdes) agar masyarakat juga turut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan infrastuktur tersebut ataupun kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

Pengendalian, pengaturan, pengelolaan, dan pelaksanaan anggaran dana desa untuk tujuan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, merupakan proses pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan bertahap. Hal ini untuk kemaslahatan warga Desa Taman Kuncaran, agar dapat tumbuh dan berkembang secara konsisten dan sesuai dengan perencanaan program pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi menjadi tiga langkah:

1. Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di desa Taman Kuncaran Kabupaten Malang, mengikuti ketentuan yang berlaku dimulai dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif pada saat musyawarah perencanaan pembangunan desa. Tim pelaksana Alokasi dana desa yang disebutkan dalam rencana tersebut terdiri dari kepala desa yang merupakan Kepala Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa yang merupakan pengelola administrasi (PJAK), bendahara desa yang merupakan kepala urusan keuangan (KUK) dan didukung oleh lembaga kemasyarakatan di desa. Perencanaan partisipatif dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan sebagian masyarakat desa. Musrebang Desa bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam persiapan dan perencanaan kegiatan pembangunan di desa.

2. Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Di Desa Taman Kuncaran, pelaksanaan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa dalam rangka pertumbuhan pembangunan, dengan anggaran alokasi dana desa. Uang desa diberikan untuk melaksanakan pembangunan dalam bentuk sarana dan prasarana penunjang masyarakat, dengan 30% (tiga puluh persen) dana digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD.

3. Tahapan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Selama masa pertanggungjawaban ini, tahapan penyelesaian penyusunan Pertanggungjawaban Pengelola Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan Desa Taman Kuncaran sangat efektif, dimana pemerintah Desa menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang tanggung jawabnya sebagai tim meninjau semua kegiatan yang dilakukan dalam manajemen Alokasi Dana Desa yang bertujuan agar perubahan

struktur perekonomian di desa bagi masyarakat Desa Taman Kuncaran Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

Diketahui bahwa struktur ekonomi adalah susunan sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Perubahan struktur perekonomian Indonesia di sektor pertanian, industri, dan jasa dapat berpotensi terjadinya perubahan struktural pada strata ekonomi dan sosial, dan hal ini berbanding lurus dengan perubahan pendapatan masyarakat dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan. Faktor yang mempengaruhi transformasi struktural dalam bidang ekonomi atau struktur ekonomi ialah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi memiliki arti yang lebih luas dan mencakup perubahan struktur ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Secara umum, pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang meningkatkan pendapatan per kapita riil penduduk suatu negara dalam jangka panjang dengan memperbaiki sistem kelembagaan (Todaro, 2000). Perkembangan perekonomian di desa Taman Kuncaran Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan yang cukup signifikan. Inilah yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat, untuk mengetahui pendapatan riil atau perkembangan ekonomi suatu desa agar pembangunan ekonomi memiliki arti yang lebih luas dan mencakup perubahan struktur ekonomi masyarakat secara umum.

Kedua adalah pendapatan perkapita. Menurut Sukirno (2004), pendapatan perkapita menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata penduduk suatu negara atau daerah dalam suatu periode biasanya satu tahun. Pendapatan per kapita dihitung dengan membagi pendapatan daerah dengan jumlah penduduk. Baik di sektor pertanian, industri dan jasa, pendapatan per-kapita masyarakat dapat berpotensi untuk perubahan struktural pada strata sosial masyarakat Desa Taman Kuncaran Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Pendapatan perkapita masyarakat desa dari tahun ke tahun sudah cukup baik, terlebih lagi masyarakat selalu berupaya secara aktif untuk mengembangkan usaha mereka dari sektor pertanian.

Selanjutnya adalah kontribusi sektor manufaktur/industry. Industri manufaktur merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, karena kontribusi industri manufaktur memberikan kontribusi penting bagi terwujudnya tujuan pembangunan ekonomi nasional khususnya pertumbuhan PDB. Industri juga dapat membuka peluang penciptaan dan perluasan lapangan kerja yang secara tidak langsung akan meningkatkan taraf hidup masyarakat, berdampak pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, sektor industri manufaktur memiliki peran penggerak dan menarik serta berdampak positif terhadap perkembangan kegiatan sektor ekonomi seperti perdagangan, transportasi, jasa, pariwisata dan sector-sector terkait lainnya (Qorib, 2020).

Industri manufaktur mengacu pada perusahaan yang mengolah bahan mentah dan mengubahnya menjadi produk jadi yang memiliki nilai tambah atau produk setengah jadi, yang dilakukan secara mekanis dengan atau tanpa menggunakan mesin (manual). Industrialisasi sering diartikan sebagai proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang ada secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan industri manufaktur (kutipan dari majalah Business Administration 2018).

Kontribusi sektor industri memegang peranan penting dalam bidang ekonomi. Dengan demikian dapat memacu pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) di sektor industri manufaktur, menyerap tenaga kerja, meningkatkan ekspor dan meningkatkan investasi masyarakat pedesaan. Jasa pendapatan nasional sangat mempengaruhi besar kecilnya nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara untuk kepentingan wilayah tertentu. Ini juga merupakan pelayanan

terhadap pendapatan negara yang sangat mempengaruhi sarana dan prasarana yang harus didukung dengan bekal keterampilan para pemberi jasa.

Faktor Pendukung

Tersedianya metode alokasi dana secara jelas, yang memungkinkan tim pelaksana melaksanakan tugasnya secara efektif merupakan faktor yang mendorong terlaksananya kegiatan alokasi anggaran desa untuk pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya, sumber daya manusia untuk perangkat desa Taman Kuncaran cukup berkualitas, hal ini didasarkan pada pengetahuan aparat desa tentang tanggung jawab dan fungsi utama mereka. Pengelola Desa Taman Kuncaran juga terampil dalam mengelola desa dan memiliki etos kerja yang kuat.

Faktor Penghambat

Kurangnya partisipasi masyarakat desa Taman Kuncaran dalam perencanaan dan pemantauan program pembangunan desa menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa. Seperti diketahui, pembangunan infrastruktur di Desa Taman Kuncaran masih kurang, misalnya akses jalan yang menghubungkan antar desa yang belum dibangun dengan lapisan penetrasi (LAPEN). Semua program pembangunan yang akan dikembangkan harus direncanakan dan diawasi oleh masyarakat, agar program pembangunan bisa mencapai sasaran dan tepat pada tujuan yang akan berdampak pada kenyamanan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi supaya terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat umum.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan “Alokasi Dana Desa Sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan Desa Taman Kuncaran Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang” bahwa perkembangan struktur ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dan terjadinya perubahan pada sektor pertanian, industri dan jasa. Tentu berbanding lurus dengan pembangunan ekonomi nasional, semakin tinggi pendapatan per kapita masyarakat maka semakin besar pula pembangunan ekonomi nasional.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa untuk meningkatkan pembangunan adalah adanya alokasi dana yang terarah, transparan dan akuntabel, sehingga tim pelaksana dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Selain itu SDM aparatur desa dinilai cukup berkualitas. Diketahui dari pengetahuan perangkat desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Perangkat desa Taman Kuncaran juga memiliki keterampilan yang baik dan komitmen kerja yang tinggi dalam menjalankan roda pemerintah dan menggerakkan pembangunan di Desa Taman Kuncaran-Tirtoyudo Kab. Malang.

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa ialah kurangnya keterlibatan masyarakat desa Taman Kuncaran dalam pengawasan program pembangunan desa. Diketahui bahwa masih banyak warga yang melihat ini sebagai tugas pemerintah saja sehingga pembangunan apapun termasuk infrastruktur yang belum memadai lepas dari pengawasan masyarakat, seperti akses jalan antar kampung di desa Taman Kuncaran yang belum di aspal atau belum dibuatkan lapisan penetrasi (LAPEN).

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Program Studi Ilmu Administrasi Publik-Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi yang telah mendorong kami dalam menulis artikel. Artikel ini merupakan hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan selama satu

semester dengan judul; “Alokasi Dana Desa Sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan Desa Taman Kuncaran Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang”

Semoga artikel ini dapat dijadikan referensi serta bermanfaat untuk pengembangan keilmuan dan kemashlahatan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Asrorul Mohammad dan Yani Turhan M. H. 2017. *Peran Pondok Pesantren Dalam Menumbuhkan Sikap Kemandirian Santri Melalui Kegiatan Wira Usaha Di Ponpes Mukmin Mandiri Sidoarjo*. Vol. 5: 889-903
- Lasa, Yohanes Dan Lestari Widi Asih. 2018. *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat*. Jurnal Dosen Administrasi Publik. Vol.7, Nomor 1.
- Madea, Yolanda, Laloma Alden, Londa Y. Very. 2017. *Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa*. Vol. 3, Nomor 46.
- Qorib, F. 2020. *Strategi PR dalam Mengembangkan Pariwisata*. Lombok: FP Aswaja
- Rahum Abu. 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.3, Nomor 4 : 1523-1636.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB PRESS).
- Syaodih Nana. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2014. *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi III. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Todaro, Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.